



LAPORAN KINERJA INTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PEMERINTAH KAB.TORAJA UTARA
TAHUN 2023

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara merupakan wujud atas pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan APBD tahun 2023 sebagai penjabaran RPJMD dan RKPD, sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)) Kabupaten Toraja Utara disusun dengan melakukan analisa terhadap 15 Sasaran Strategis yang uraiannya sbb :

- Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan terdiri dari 1 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 6.349.835.674,-
- Misi 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 554. 010.530.062,-
- Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 47.725.820.380,-
- Misi 4 Reformasi Birokrasi terdiri dari 3 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 1.208.456.806.455,-
- Misi 5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi terdiri dari 3 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 14 program dengan anggaran sebesar Rp. 93.926.694.239,-
- Misi 6 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 16 program dengan anggaran sebesar Rp. 375.958.972.505,-
- Misi 7 Mewujudkan Kedaulatan Pangan terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 7.593.186.372,-
- Misi 8 Pembinaan Prestasi terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 9.019.348.736,-
- Misi 9 Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 95. 379.612.883,-
- Misi 10 Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 6 program dengan anggaran sebesar Rp. 17.404.059.524,-

- Misi 11 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan terdiri dari 1 Sasaran, dan dalam mencapai sasaran ini didukung oleh 2 program dengan anggaran sebesar Rp. 24.327.725.165,-

Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja tahu 2023 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 15 sasaran yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan Kabupaten Toraja Utara dalam RKPD tahun 2023 adalah sebesar 82,2 atau tergolong dalam kriteria **Tinggi**

Nilai Persentase pencapaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 dilihat dari beberapa Indikator dibawah ini, antara lain:

- a. Indeks Pembangunan Manusia dari 70,36 menjadi 71, 23
- b. Indeks Pendidikan dari 64,78 menjadi 65,64
- c. Indeks Kesehatan dari 82,54 menjadi 84,43
- d. Angka Harapan Hidup dari 73,65 menjadi 73,83
- e. Indeks Reformasi Birokrasi dari 47,12 menjadi 54,90
- f. Nilai SAKIP Daerah dari 58,13 menjadi 60,36
- g. Indek Kepuasan Masyarakat dari 80,76 menjadi 82,15
- h. IPKD dari 61,8751 menjadi 76,998
- i. PDRB dari 42,17 menjadi 45,03
- j. Rasio Gini dari 0,356 menjadi 0,348
- k. Angka Kemiskinan dari 11,65 menjadi 12,12
- l. Indeks Daya Saing Infrastruktur dari 71,74 menjadi 76,62
- m. Skor Pola Pangan Harapan dari 78, 7 menjadi 81,1
- n. Ketersediaan Energi/Kapita dari 2.100 menjadi 2.100
- o. Ketersediaan Protein/kapita dari 57 menjadi 60
- p. Indeks Desa Membangun dari 0,5878 menjadi 0,6020

Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil kerja dan berkat dukungan dari seluruh pihak baik pegawai, masyarakat maupun pihak-pihak lain. Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Instansi Pemerintah tahun 2023 ini bisa dijadikan bahan penilaian dan pertimbangan bagi para stakeholder terkait tentang pencapaian kinerja yang selama ini telah dilaksanakan dengan lebih meningkatkan kinerja di masa mendatang dan sebagai tolak-ukur dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Toraja Utara.

Rantepao, Maret 2023
BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG,SE.,M.Si

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum	2
1.2.1 Geografis	2
1.2.2 Demografi.....	4
1.3 Pertumbuhan Ekonomi.....	6
1.4 Bidang Kewenangan	11
1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
1.5.1 Sekretariat Daerah	13
1.5.2 Sekretariat DPRD.....	14
1.5.3 Dinas-Dinas Daerah.....	14
1.5.4 Badan-Badan dan Inspektorat	15
1.5.5 Kecamatan.....	16
1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara	17
1.7 Maksud dan Tujuan	18
1.8 Sistematika Laporan Kinerja	20
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	21
2.1.1 Visi.....	21
2.1.2 Misi.....	22
2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	25
2.2 Perjanjian Kinerja	30
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023	35
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023....	37
3.2 Capaian IKU Tahun 2023	38
3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	40
3.4 Akuntabilitas Keuangan	87
BAB 4 PENUTUP.....	95

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 *Latar Belakang*

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan azaz-azaz umum penyelenggaraan Negara, meliputi : Azaz Kepastian Hukum, Azaz Tertib Penyelenggaraan Negara, Azaz Kepentingan Umum, Azaz Keterbukaan, Azaz Proporsionalitas, Azaz Profesionalitas, dan Azaz Akuntabilitas. Azaz akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum

1.2.1 Geografis

Kabupaten Toraja Utara termasuk wilayah dataran tinggi. secara geografis letaknya antara 2° - 3° Lintang Selatan dan 119° - 120° bujur timur.

Kabupaten Toraja Utara dilewati oleh salah satu sungai terpanjang yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan, yaitu Sungai Saddang.

Jarak Ibukota Kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 329 km yang melalui Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-Pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros.

Luas wilayah Kabupaten Toraja Utara tercatat 1.151,47 Km persegi yang meliputi 21 kecamatan. Kecamatan Baruppu' dan Kecamatan Buntu Pepasan merupakan 2 kecamatan terluas dengan luas masing-masing 162,17 dan 131,72 km persegi atau luas kedua kecamatan tersebut merupakan 25,52 persen dari seluruh wilayah Toraja Utara.

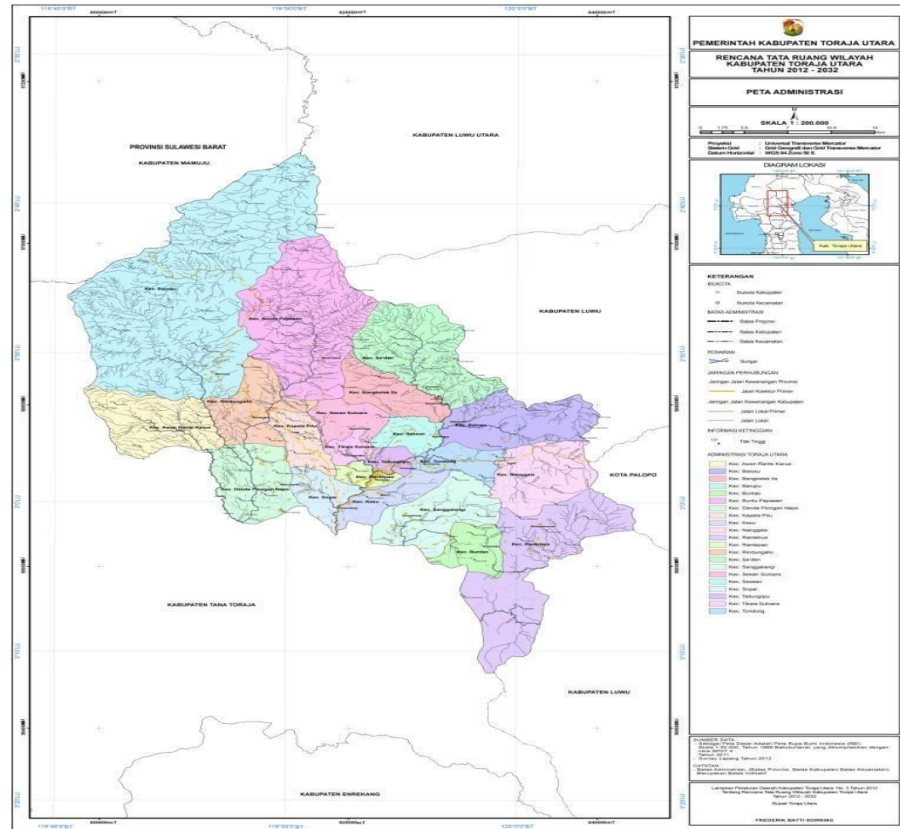
Batas wilayah Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kab. Luwu Utara dan Prov. Sulawesi Barat
- b. Sebelah Timur : Kab. Luwu dan Kota Palopo

c. Sebelah Selatan : Kab. Tana Toraja

d. Sebelah Barat : Propinsi Sulawesi Barat

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Toraja Utara



Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara secara administratif terbagi atas 21 Kecamatan, 40 Kelurahan, dan 111 Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa di Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1.	Kecamatan Awan Rante Karua	-	4
2.	Kecamatan Balusu	2	5
3.	Kecamatan Bangkelekila	-	4
4.	Kecamatan Baruppu'	1	3
5.	Kecamatan Buntao	2	4
6.	Kecamatan Buntu Pepasan	1	12



7.	Kecamatan Dende' Piongan Napo	1	7
8.	Kecamatan Kapala Pitu	-	6

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa
9.	Kecamatan Kesu'	2	5
10.	Kecamatan Nanggala	1	8
11.	Kecamatan Rantebua	2	5
12.	Kecamatan Rantepao	9	2
13.	Kecamatan Rindingallo	2	7
14.	Kecamatan Sa'dan	2	8
15.	Kecamatan Sanggalangi	1	5
16.	Kecamatan Sesean	5	4
17.	Kecamatan Sesean Suloara'	-	5
18.	Kecamatan Sopai	1	7
19.	Kecamatan Tallunglipu	6	1
20.	Kecamatan Tikala	2	5
21.	Kecamatan Tondon	-	4
	Jumlah 2019	40	111

Sumber data: Kabupaten Toraja Utara dalam Angka 2023

1.2.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Toraja Utara berdasarkan hasil registrasi penduduk Tahun 2023 berjumlah **261.652** jiwa yang tersebar di 21 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 28.231 jiwa mendiami Kecamatan Rantepao.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan, yang masing-masing 134.913 jiwa penduduk laki-laki dan 129.232 jiwa penduduk perempuan. Hal ini juga tercermin pada angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100, yaitu 104,3%, ini berarti dari setiap 100 orang perempuan

terdapat 104 laki-laki.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 telah mencapai 229,40 jiwa/km persegi. Kecamatan terpadat terdapat di Kecamatan Rantepao, dengan tingkat kepadatan mencapai 2.775,02 jiwa/km persegi, sedangkan kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Buntu Pepasan dan Baruppu', yaitu 47,12 jiwa/km persegi.

Profil sosial masyarakat dapat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk suatu kabupaten atau wilayah. Namun demikian tingkat kepadatan yang ideal di suatu kabupaten tidak dapat ditentukan dengan pasti karena tergantung pada potensi yang dimiliki dan kemampuan penduduk di Kabupaten tersebut dalam memanfaatkan potensi yang ada. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menyadari bahwa ukuran kepadatan penduduk suatu kabupaten akan lebih bermakna bila dikaitkan dengan potensi kabupaten dan kondisi penduduk antar kecamatan di Kabupaten Toraja Utara yang bervariasi.

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Awan Rante Karua	13.808	14.956	5.667	1.283	5.908
2	Balusu	7.678	7983	8.163	2.142	8.341
3	Bangkelekila'	7.589	8.525	9.314	9.314	7.934
4	Baruppu'	6.860	7.451	7.864	7.864	7.251
5	Buntao'	10.808	11.443	11.893	11.893	11.197
6	Buntu Pepasan	5.462	14.582	14.940	14.940	14.311
7	Dende' Piongan Napo	8.895	9.046	9.178	9.178	9.108
8	Kapala Pitu	6.793	6.982	7.110	7.110	7.279

9	Kesu'	18.047	19.150	19.753	19.753	19.504
10	Nanggala	9.736	10.376	10.518	10.518	10.257
11	Rantebua	8.470	8.989	9.196	9.196	8.878
12	Rantepao	26.791	28.451	28.757	28.757	28.231
13	Rindingallo	8.904	9.070	9.378	9.378	9.370
14	Sa'dan	18.012	18.722	19.370	19.370	18.987
15	Sanggalangi	13.039	13.218	13.532	13.532	13.765
16	Sesean	12.741	13.319	13.712	13.712	13.396
17	Sesean Suloara'	6.599	6.943	7.019	7.019	7.170
18	Sopai	14.956	15.687	16.098	16.098	16.142
19	Tallunglipu	18.570	20.644	20.976	20.976	19.965
20	Tikala	12.073	12.342	12.662	12.662	12.677
21	Tondon	11.479	12.529	13.098	13.098	11.981
K abupaten		247.157	261.086	264.145	268.198	261.652

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

1.3 *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat perkembangan pembangunan ekonomi daerah. Ukuran ini digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan output dalam suatu perekonomian, selain itu indikator ini sesungguhnya memberikan indikasi tentang sampai sejauh mana aktifitas perekonomian selama periode tertentu yang telah menghasilkan pendapatan bagi masyarakat.

Gejala tersebut tersirat dalam rangka pertumbuhan output, karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan

jasa, yang pada gilirannya proses ini akan menghasilkan aliran balas jasa faktor-faktor produksi yang dikuasai masyarakat. Dengan demikian adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat yang menguasai faktor-faktor produksi juga meningkat.

Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas dasar harga konstan merupakan dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, dengan demikian angka pertumbuhan yang diperoleh semata-mata mencerminkan pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) riil yang dihasilkan oleh aktifitas perekonomian suatu daerah/wilayah pada periode tertentu.

Penggunaan atas dasar harga konstan dimaksudkan untuk menghindari pengaruh perubahan harga, sehingga perubahan yang diukur merupakan pertumbuhan riil ekonomi.

Sejak terbentuknya Toraja Utara Tahun 2008, Perekonomian Toraja Utara Cukup baik dengan angka pertumbuhan tiap tahunnya meningkat cukup besar. Pertumbuhan ekonomi 2019 mengalami perlambatan karena adanya pandemic covid 19 dari tahun 2020 sebesar 0,17 persen menjadi 4,05 persen. Dengan berkembangnya perekonomian Toraja Utara, maka akan berdampak pada peningkatan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) perkapita. Untuk mengetahui gambaran tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah, maka dipergunakan PDRB (Produk Domestik Bruto) sebagai indikator penentu guna melihat tingkat perekonomian penduduk, namun angka tersebut belum menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka tersebut hanya merupakan angka rata-rata.

Walaupun demikian angka dimaksud sudah dapat dipergunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kecenderungan tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah. Adapun perkembangan PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.4
Pertumbuhan
PDRB
Provinsi Sulawesi Selatan dan PDRB
Toraja Utara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2019-2023 (%)

Tahun	PDRB Sul-Sel	PDRB Toraja Utara
2019	7,06	8,07
2020	6,92	7,56
2021	-0,70	0,17
2022	0,377	5,27
2023	4,51	3,94

Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dilihat dari Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Lapangan Usaha selama periode tahun 2020-2022, perekonomian Kabupaten Toraja Utara juga menunjukkan peningkatan yang positif, tetapi pada kurun waktu 2022 sampai dengan 2023 mengalami perlambatan karena lapangan pekerjaan tidak banyak terbuka.

Sementara itu struktur ekonomi Tahun 2022 lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 5,74 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran berkontribusi sebesar 12,58 persen, tahun 2023 seluruh kategori produk domestik mengalami perlambatan diakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Tabel 1.5
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2019	2020	2021	2022*	2023*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,82	1,59	-1,08	5,74	1.82
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	17,32	20,15	-0,55	-1,91	3.36
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	11,31	9,73	-3,47	10,94	2.72
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	6,23	12,13	4,58	3,22	6.23



E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	6,05	4,79	13,00	14,43	4.76
F	Konstruksi/Construction	6,44	7,65	-0,18	1,02	3.43
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	8,45	8,89	-0,21	5,56	5.36
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9,24	12,23	-10,29	11,37	10.21
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	14,36	12,70	-4,09	14,64	8.59
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	11,92	10,49	12,00	5,81	3.58
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	6,97	7,74	5,46	14,00	-0.85
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	4,76	6,06	2,71	1,18	2.09
M, N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	10,92	7,27	-7,07	15,52	11.48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	19,53	11,91	-0,38	3,71	3.04
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	6,72	3,94	3,43	1,83	2.37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	14,92	5,46	5,83	6,35	6.09
R, S, T, U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	13,57	6,09	-7,01	11,24	10.38
Produk Domestik Bruto/Gross		8,07	7,56	0,17	5,27	3,94

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend cenderung meningkat setiap tahunnya pada periode 2019-2023 adalah lapangan usaha pertambangan dan penggalian, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha transportasi dan pergudangan, lapangan usaha jasa keuangan dan

asuransi, lapangan usaha real estate. Sedangkan lapangan usaha yang memperlihatkan kontribusi trend menurun periode tahun 2019-2023 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas.

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro adalah PDRB perkapita. Semakin tinggi PDRB perkapita yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik.

Tabel 1.6
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2023

Tahun	NILAI PDRB (jutaan)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
2019	9.596.352,48	5.140.012,3
2020	9.721.428,1	5.148.554,7
2021	10.344.298,97	5.357.128,99
2022	11.311.305,8	5.639.375,3
2023	12.307.763,25	5.861.316,16

Sumber :BPS Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

PDRB atas harga konstan menunjukkan peningkatan yang sama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, nilai capaian berada pada posisi Rp. 5.639.375,3 juta pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp.5.861.316,16 juta, selanjutnya PDRB Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel 1.6

Dilihat dari tabel diatas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toraja Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

1.4 Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Kabupaten Toraja Utara terdiri atas Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Bukan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintah Pilihan dan Urusan Penunjang.

Tabel 1.7
Urusan Pemerintahan Kabupaten Toraja Utara

N O	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BUKAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	URUSAN PENUNJANG
1	Pendidikan	Tenaga Kerja	Kelautan dan Perikanan	Penunjang Administrasi Pemerintahan
2	Kesehatan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pariwisata	Penunjang Pengawasan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pangan	Pertanian	Penunjang Perencanaan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Pertanahan	Kehutanan	Penunjang Keuangan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Lingkungan Hidup	Energi dan Sumber Daya Mineral	Penunjang Kepegawaian



6	Sosial	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perdagangan	
7		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perindustrian	
8		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Transmigrasi	
9		Perhubungan		
10		Komunikasi dan Informatika		
11		Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah		
12		Penanaman Modal		
13		Kepemudaan dan Olah Raga		
14		Statistik		
15		Persandian		
16		Kebudayaan		
17		Perpustakaan		
18		Kearsipan		

1.5 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1.5.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, fungsi dari Sekretariat Daerah mencakup:

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara dan instansi daerah
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Sekretaris Daerah

- 1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - (1). Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama
 - (2). Bagian Kesejahteraan Rakyat dan
 - (3). Bagian Hukum

- 2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - (1). Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - (2). Bagian Administrasi Pembangunan
 - (3). Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
- 3) Asisten Administrasi Umum
 - (1) Bagian Organisasi
 - (2) Bagian Umum dan Protokol
 - (3) Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - (4) Staf Ahli
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional

1.5.2 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dprd
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan dprd
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat dprd
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Adapun struktur organisasi sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- 1. Sekretariat DPRD
- 2. Bagian Umum
- 3. Bagian Keuangan
- 4. Bagian Persidangan dan Produk Hukum

1.5.3 Dinas-Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Teknis Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu.

Jumlah dinas yang ada di Kabupaten Toraja Utara ada 22 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan,
2. Dinas Kesehatan,
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan
5. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelematan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
14. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
17. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
19. Dinas Pertanian

1.5.4 Badan-Badan dan Inspektorat

Badan sebagai Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Badan-Badan Daerah di Kabupaten Toraja Utara berjumlah 6 (enam) dan Inspektorat 1 dengan rincian sebagai berikut :



1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7. Inspektorat Kabupaten

1.5.5 Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat Daerah yang dipimpin seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Organisasi kecamatan terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Perekonomian
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pembangunan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Jumlah kecamatan di Kabupaten Toraja Utara ada 21 kecamatan dengan, rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Awan Rante Karua
2. Kecamatan Balusu
3. Kecamatan Bangkelekila'
4. Kecamatan Baruppu'
5. Kecamatan Buntao'
6. Kecamatan Buntu Pepasan
7. Kecamatan Dende' Piongan Napo
8. Kecamatan Kapala Pitu
9. Kecamatan Kesu'
10. Kecamatan Nanggala

11. Kecamatan Rantebua
12. Kecamatan Rantepao
13. Kecamatan Rindingallo
14. Kecamatan Sa'dan
15. Kecamatan Sanggalangi'
16. Kecamatan Sesean
17. Kecamatan Sesean Suloara'
18. Kecamatan Sopai
19. Kecamatan Tallunglipu
20. Kecamatan Tikala
21. Kecamatan Tondon

1.6 Jumlah Aparatur Sipil Negara

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparat Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sesuai dengan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toraja Utara sebanyak 3.419 orang.

Tabel 1.8
Jumlah Aparat Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/Sederajat	3
2	SLTP/Sederajat	11
3	SLTA/Sederajat	245
4	Diploma I/II/III/IV	390
5	Strata I, Strata II, Doktor	2603
Total		3.419

Sumber :BKPSDM Kab. Toraja Utara Tahun 2023

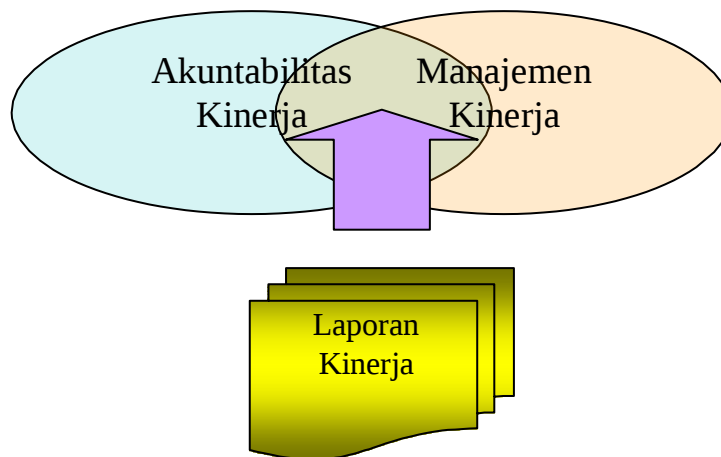
1.7 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini memberikan tuntunan kepada semua instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misidan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem Kinerja diawali dengan penyusunan Rencana Strategik yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Secara selaras setiap Tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* (Gubernur,

DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja Instansi pemerintah tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi Pemerintah.



Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Toraja Utara atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun tersebut. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023.
- Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya

sehingga capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.8 Sistematika Laporan Kinerja

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan Gambaran Umum, menjelaskan secara ringkas profil Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja 2023 ini
- Bab II Perencanaan Kinerja, mendeskripsikan perencanaan jangka menengah dan rencana kinerja untuk Tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis Tahun 2023
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 *Rencana Strategis Tahun 2021-2026*

RPJMD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana instansi Pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah. Oleh karenanya untuk membangun Kabupaten Toraja Utara yang lebih baik dimasa mendatang pada RPJMD Tahun 2021- 2026 memberi prioritas pada upaya untuk mengatasi permasalahan antara lain

: kesehatan, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian dan penyelamatan lingkungan, termasuk mengantisipasi perubahan yang terjadi di masa yang akan datang.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada, serta adat dan budaya masyarakat Kabupaten Toraja Utara maka visi yang hendak dicapai dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING”**

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka perlu dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak. Maka rumusan misi Kabupaten Toraja Utara yaitu :

- **Misi 1 Meningkatkan Kualitas Pendidikan**
- **Misi 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat**
- **Misi 3 Meningkatkan Daya Saing Pariwisata**
- **Misi 4 Reformasi Birokrasi**
- **Misi 5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi**
- **Misi 6 Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur**
- **Misi 7 Mewujudkan Kedaulatan Pangan**
- **Misi 8 Pembinaan Prestasi Pemuda**
- **Misi 9 Pemberdayaan Masyarakat**
- **Misi 10 Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat**
- **Misi 11 Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan**

Makna pokok yang terkandung dalam Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara tersebut, antara lain **Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang didukung partisipasi masyarakat**, adalah wujud hubungan yang bersifat simbiosis mutualistis antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan perkembangan kebutuhan nyata dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Toraja Utara. Oleh karena itu manajemen Pemerintahan yang baik dan bijak harus berdasarkan pada nilai-nilai manajemen modern sebagai berikut:

a. Efisiensi dan efektifitas

Persoalan mendasar yang dihadapi dalam era otonomi dan globalisasi adalah kelangkaan sumber daya, dana, waktu dan kelangkaan kualitas terbaik sumber daya manusia/aparatur, kemampuan mengoptimalkan berbagai sarana kerja untuk mencapai sasaran kerja dan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu tidaklah berlebihan bahwa efisiensi dan efektifitas menjadi suatu nilai utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

b. Profesional dan transparan

Setiap aparat birokrasi sesungguhnya adalah seorang professional terlepas apakah pelaksana teknis operasional ataupun pejabat yang menduduki jabatan puncak pada suatu unit kerja. Profesionalisme adalah upaya sistematis, terprogram dan secara kontinyu memutakhirkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya.

Sejalan dengan profesionalisme, keterbukaan (transparansi) dalam menjalankan profesinya dalam arti kata bahwa dalam interaksinya dengan warga masyarakat, pemenuhan kewajiban dan perolehan hak harus secara jujur, adil, bertanggung jawab dan tetap konsisten dengan pemberantasan KKN serta diterapkan secara konsekuen.

c. Antisipatif, responsif dan inovatif

Selain organisasi dan aparat Pemerintah harus responsif (tanggap) terhadap kebutuhan masyarakat, lebih dari itu diperlukan adanya sikap yang antisipatif, yang mampu memberikan jawaban atau solusi terhadap berbagai kemungkinan munculnya berbagai permasalahan. Pemerintahan yang responsif dan antisipatif sesungguhnya belum mampu menjawab berbagai tantangan eksternal maupun masalah internal, namun diperlukan sikap yang kreatif dan inovatif.

d. Orientasi pelayanan

Tugas utama Pemerintahan dalam era otonomi adalah memfasilitasi, menyusun regulasi berbagai aktifitas masyarakat sehingga tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku. Fungsi utama memberikan pelayanan terbaik (prima) untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya aktivitas masyarakat.

Untuk memenuhi tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mencanangkan 4 (Empat) prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional daerah sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi dan mendorong masyarakat dalam arti luas, yang artinya para pejabat pengelola program kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya mendorong masyarakat berpartisipasi secara aktif.
- 2) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan dituntut untuk mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kondisi lingkungan dan sumber daya alam harus dikelola agar pembangunan dapat memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dari generasi ke generasi.
- 3) Pengarusutamaan gender. Pada hakekatnya hak-hak asasi manusia tidak membedakan perempuan dan laki-laki. Strategi pengarusutamaan gender ditujukan untuk mengurangi kesenjangan

gender di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu perempuan dan laki-laki menjadi mitra yang sederajat dan memiliki akses, kesempatan dan manfaat dari pembangunan yang adil dan setara.

- 4) Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik. Tata pengelolaan meliputi berbagai faktor kelembagaan dan organisasi yang mempengaruhi pembentukan kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat, khususnya kelompok usaha. Dengan tata pengelolaan yang baik harus melandasi pelaksanaan berbagai program kegiatan pembangunan di mana pemerintahan dan perusahaan akan berjalan secara efisien dan efektif.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan lainnya yang saling terkait. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Visi
**Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara yang Mandiri,
Berbudaya dan Berdaya Saing**

Misi 1
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga pendidikan diiringi dengan penyadaran masyarakat atas pentingnya pendidikan dan literasi



Misi 2

Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas Pelayanan Kesehatan	Memenuhi sarana/prasarana dan tenaga kesehatan serta pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat

Misi 3

Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan daya saing destinasi wisata	Meningkatnya daya tarik pariwisata	Mengembangkan daya tarik destinasi wisata secara proporsional dengan fasilitas ekonomi wilayah dan perilaku sadar wisata masyarakat

Misi 4

Reformasi Birokrasi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran reformasi birokrasi yaitu : 1). Bersih dan akuntabel 2). Efektif dan efisien memiliki pelayanan public yang berkualitas 2. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemeritahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu



	3. Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas 3. Perbaikan sistem dan pemenuhan standar dokumen perencanaan dan keuangan dengan dukungan SDM dan sarana/prasarana yang sesuai
--	---	---

Misi 5
Penguatan Pertumbuhan Ekonomi, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	1. Meningkatkan kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah 2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja 3. Berkurangnya kemiskinan daerah	1. Mengoptimalkan kemajuan teknologi dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien 2. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin 3. Mengoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat dan penguatan UMKM seiring dengan pengurangan beban pengeluaran orang miskin

Misi 6
Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan aksesibilitas dan keterpenuhan infrastruktur yang berkualitas dengan mengarusutamakan peningkatan kualitas SDM konstruksi



Misi 7
Mewujudkan Kedaulatan Pangan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan keamanan produk pangan secara konsisten dengan pemeliharaan lahan pangan berkelanjutan

Misi 8
Pembinaan Prestasi Pemuda, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya prestasi pemuda	Memberdayakan organisasi pemuda untuk partisipasi dalam pembangunan dan prestasi olahraga

Misi 9
Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	Memperkuat pemerintahan lembang, pembangunan lembang, pemberdayaan masyarakat lembang dan kemasyarakatan lembang dalam mendukung ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang

Misi 10
Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum	Mendorong keswadaya masyarakat dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman secara kolaborasi multipihak dalam mencegah pengurangan angka kriminalitas masyarakat

Misi 11
Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan, meliputi:

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Menguatkan peranan organisasi keagamaan dalam menggiatkan aktivitas keagamaan

Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 perencanaan kinerja yang termuat dalam RKPD tahun 2023 Pemda Kabupaten Toraja Utara menetapkan Program prioritas dengan memperhatikan perubahan kondisi lingkungan strategis daerah, kondisi organisasi, tema pembangunan Kabupaten Toraja Utara, serta dokumen acuan perencanaan lainnya.

Program prioritas Pemerintah Kabupaten Toraja Utara lebih ditekankan pada kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dengan tetap memperhatikan paradigma baru pembangunan yang berbasis pada manusia dan komunitas dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana kinerja 2023 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2021-2026, hasil evaluasi atas pelaksanaan yang dicapai pada tahun 2023, serta penajaman dan skala prioritas program strategis pada tahun 2023, maka prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tema umum pembangunan pada tahun 2023 adalah “ Optimalisasi Pelayanan Umum Berbasis Standar Pelayanan Minimal dan Pemeliharaan Kondisi Tertib dan Aman dalam Mendukung Dinamika Sosial Politik dan Demokrasi”.

Pada tahun 2023 merupakan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Toraja Utara. Tema umum pembangunan tahun ini adalah **Pembangunan Infrastruktur dan Akselerasi Reformasi Birokrasi**, kebijakan pembangunan tahun 2023 diarahkan kepada :

- (1) Peningkatan kompetensi bagi guru-guru;
- (2) Pemenuhan sarana/prasarana untuk puskesmas dan pustu;
- (3) Pembukaan destinasi/obyek wisata baru dan pembangunan infrastruktur pariwisata;
- (4) Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik;
- (5) Peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan ASN;
- (6) Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan;
- (7) Pemberdayaan masyarakat miskin;
- (8) Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- (9) Revitalisasi dan regenerasi pengembangan tanaman perkebunan kopi;
- (10) Peningkatan prestasi olah raga dan kompetisi daerah berbagai cabang olah raga;
- (11) Penguatan kelembagaan lokal lembang;
- (12) Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja;
- (13) Semarak aktivitas gereja dan kegiatan keagamaan lainnya.

2.2 Perjanjian Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan sesuai agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Di dalam Rencana Kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023.



Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya.

Adapun Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan				
1	Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	69,68
2	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	64,01
Misi 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	82,68
2	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Persentase angka harapan hidup	%	73,72
Misi 3 : Meningkatkan Daya Saing Pariwisata				
1	Meningkatkan daya saing destinasi wisata	% Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	%	6,00
2	Meningkatnya daya tarik pariwisata	% Peningkatan kunjungan wisatawan	%	25,00



Misi 4 : Reformasi Birokrasi				
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Indeks reformasi birokrasi (nilai)	Nilai	62,30 (B)
2	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	61,50 (B)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM	Indeks	82,05
4	Meningkatnya kinerja pengelolaan perencanaan dan keuangan daerah	IPKD	Indeks	78
Misi 5 : Penguatan Pertumbuhan Ekonomi				
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merata	PDRB/kapita (Rp. Juta)	Rupiah	42,06
		Rasio gini	%	0,368
2	Meningkatnya kualitas pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan ekonomi	%	5,19-6,92
3	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	%	3,05
4	Berkurangnya kemiskinan daerah	Angka kemiskinan (%)	%	11,45
Misi 6 : Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur				



2	Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah	Indeks daya saing infrastruktur	Indeks	72,06
		Indeks Resiko Bencana	Indeks	149,8
Misi 7: Mewujudkan Kedaulatan Pangan				
1	Meningkatkan kemandirian pangan masyarakat	Skor pola pangan harapan	Skor	86,05
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari)	%	2.372,81
		Ketersediaan protein perkapita (gram/kapita/hari)	%	66,05
Misi 8: Pembinaan Prestasi Pemuda				
1	Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,36
2	Meningkatnya prestasi pemuda	% Peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional	%	1,76
Misi 9: Pemberdayaan Masyarakat				



1	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan lembang (desa)	Indeks desa membangun (IDM) kabupaten	%	0,583 6
2	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi lembang (desa)	% lembang kualifikasi maju	%	1,80
Misi 10: Pengendalian Penyakit Sosial Masyarakat				
1	Mengurangi penyakit sosial dalam masyarakat	% penurunan angka kriminalitas	%	3,40
2	Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban umum	% gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesai	%	90,00
Misi 11: Meningkatkan Kapasitas Lembaga Keagamaan				
1	Meningkatkan intensitas kegiatan lembaga keagamaan	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	%	100%
	Berkembangnya kehidupan beragama dalam masyarakat	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100%

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.085.680.864.625,00 Untuk mencapai target kinerja sasaran

pembangunan pada tahun 2023, dicapai melalui program prioritas yaitu:

1. Pemenuhan tenaga pendidik terutama penempatan guru honorer berdasarkan kompetensi dan domisili;
2. Peningkatan status rumah sakit tipe D ke tipe C;
3. Pengadaan tempat penyimpanan darah;
4. Perampingan organisasi birokrasi penyelarasan jabatan struktural ke jabatan fungsional;
5. Pembinaan kampung adat dan seni budaya lokal;
6. Penataan organisasi dan tata laksana untuk penyederhanaan organisasi;
7. Pemulihan ekonomi dan reformasi struktural;
8. Perlindungan dan jaminan sosial rumah tangga miskin;
9. Pemenuhan fasilitas air minum dan penanganan limbah domestik;
10. Peningkatan produksi tanaman pangan berbasis biodiversitas lokal;
11. Pemenuhan fasilitas dan sarana pengembangan cabang olah raga;
12. Penguatan sistem kemasyarakatan lembang/desa;
13. Pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras dan penyakit sosial lainnya;
14. Pembinaan mental spiritual masyarakat.

2.3 Rencana Anggaran Tahun 2023

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan. Mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp 1.111.119.090.854,00** Belanja Operasi sebesar **Rp 724.003.913.706,00** atau **65,15%** dari total anggaran 2023, Belanja Modal **Rp 228.510.776.448,00** atau **20,56%** dari total anggaran 2023, Belanja Tidak Terduga **Rp 400.000.000,00** atau **0,04%** dan Belanja Transfer **Rp 158.204.400.700,00** atau **14,24**.



Tabel
Target Belanja Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	%
1	Belanja Operasi	724.003.913.706,00	65,15
2	Belanja Modal	228.510.776.448,00	20,56
3	Belanja Tidak Terduga	400.000.000,00	0,04
4	Belanja Transfer	158.204.400.700,00	14,24
Jumlah		1.111.119.090.854,00	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Dalam rangka penyusunan laporan kinerja dilakukan pengumpulan data kinerja dari satuan-satuan kerja. Berdasarkan data tersebut pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan tabel sebagai berikut:

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	$91\% \leq$	Sangat Tinggi
II	76% s.d 90%	Tinggi
III	66% s.d 75%	Sedang
IV	51% s.d 65%	Rendah
V	50%	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk perhitungan pencapaian kinerja sasaran mencapai lebih dari 100%, penghitungan kinerjanya disesuaikan dengan capaian *rill*.

- (1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*)}}{\text{Rencana}^{**)}} \times 100\%$$

- (2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana}^{**}) - (\text{Realisasi}^{*)} - \text{Rencana}^{**)}}{\text{Rencana}^{**)}} \times 100\%$$



3.2 Capaian IKU Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	Indeks Pembangunan Manusia	69,68	71,23	102,22	Sangat Tinggi
2	Indeks Pendidikan	64,1	65,64	102,4	Sangat Tinggi
3	Indeks Kesehatan	82,68	84,43	102,11	Sangat Tinggi
4	Angka Harapan Hidup	73,72	73,83	100,15	Sangat Tinggi
5	% Kontribusi PAD Sektor Pariwisata terhadap Total PAD	6,00	1,91	31,83	Sangat Rendah
6	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	25	3,9	15,6	Sangat Rendah
7	Indeks Reformasi Birokrasi (Nilai)	62,30 (B)	54,90 (CC)	88,12	Tinggi
8	Nilai SAKIP Daerah	61,50 (B)	60,36 (B)	98,14	Sangat Tinggi
9	IKM	82,05	82,15	100,12	Sangat Tinggi
10	IPKD	78	76,998	98,7	Sangat Tinggi
11	PDRB/Kapita (Rp.Juta)	42,06	45,03	107,06	Sangat Tinggi
12	Rasio Gini	0,368	0,348	105,43	Sangat Tinggi
13	Pertumbuhan Ekonomi	5,19-6,92	3,94	75,91	Sedang



14	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,05	2.60	114,75	Sangat Tinggi
15	Angka Kemiskinan (%)	11,45	12.12	94,15	Sangat Tinggi
16	Indeks Daya Saing Infrastruktur	72,06	76,62	106,3	Sangat Tinggi
17	Indeks Resiko Bencana	149,8	150	99,86	Sangat Tinggi
18	Skor Pola Pangan Harapan	86,05	81.1	94,25	Sangat Tinggi
19	Ketersediaan Energi/Kapita (kkal/kapita/hari)	2.372,81	2100	88,50	Tinggi
20	Ketersediaan Protein/kapita (gram/kapita/hari)	66,05	60	90,84	Tinggi
21	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,36	0,06	16,66	Sangat Rendah
22	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	1,76	0,15	8,5	Sangat Rendah
23	Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten	0,5836	0,6020	103,15	Sangat Tinggi
24	% Lembang Kualifikasi Maju	1,80	2,7	150	Sangat Tinggi
25	% Penurunan Angka	3,40	3,8	-227	Tinggi



	Kriminalitas				
26	% Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	90,00	91	98,88	Sangat Tinggi
27	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan	100	86,48	86,48	Tinggi
28	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	100	103,13	103,13	Sangat Tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa hampir seluruh indikator memenuhi capaian kinerja di atas 91% atau kriteria **“Sangat Tinggi”** dengan nilai rata-rata capaian adalah 82,21%. Dari 29 indikator kinerja utama hanya 28 IKU yang dapat dihitung realisasi dan capaiannya karena IKU terkait indeks Williamson hanya dapat dihitung di tingkat Provinsi.

3.3 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara

Sesuai dengan Target Kinerja Tahun 2023, Perencanaan Kinerja Tahun 2023 mencakup pelaksanaan atas 29 indikator kinerja dalam 15 sasaran strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan belum semua program yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal, capaian dari 15 sasaran

Penjelasan atas pencapaian kinerja masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1	<i>Meningkatkan Kualitas SDM melalui pendidikan</i>
-----------------	--

Keberhasilan tujuan Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan terdiri



dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Capaian atas masing-masing indikator tersebut dapat terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.1
Analisis Pencapaian Tujuan 1
Meningkatkan Kualitas SDM Melalui Pendidikan

Indikator Tujuan		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	IPM		69,33	70,36	101,48	69,68	71,23	102,22
Rata-rata capaian kinerja					101,48			102,22

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan

IPM Toraja Utara pada tahun tahun 2023 adalah 71,23% dan dibandingkan dengan target sebesar 69,68 maka Capaian indikator ini adalah sebesar 102,22%. Sedangkan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 70,36 maka IPM Toraja utara mengalami penurunan sebesar 0,87 persen.



Sasaran 1	Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat
------------------	--

Capaian kinerja sasaran 1 Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Derajat Pendidikan dan Literasi Masyarakat

Indikator Sasaran		Sat	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	indeks	63,70	64,78	101,69	64,1	65,64	102,4
Rata-rata capaian kinerja					101,69			102,4

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Sektor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendapat prioritas utama dalam pembangunan di Kabupaten Toraja Utara. Hal ini disadari bahwa faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang dan merupakan unsur dalam membentuk kualitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan adalah Indeks Pendidikan

Dari tabel diatas Indeks Pendidikan Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 adalah sebesar 65,64, ini menunjukkan bahwa ada perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu sebesar 64,78. Walaupun Indeks Pendidikan di Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan positif dari tahun ke tahun tetapi diperlukan strategi agar Indeks Pendidikan ini dapat lebih meningkat di masa yang akan datang.



Tujuan 2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
-----------------	---

Keberhasilan Tujuan 2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Analisis Pencapaian Tujuan 2
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja a Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kesehatan	%	82,50	82,54	100	82,68	84,43	102,11
Rata-rata capaian kinerja					100			102,11

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas Indeks Kesehatan Toraja Utara tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun 2022 yaitu sebesar 84,43 naik sebesar 1,89, masih lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan. Walaupun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tetap memerlukan upaya peningkatan lebih lanjut dengan terus menerus dan berkelanjutan .

Sasaran 2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan
------------------	---

Keberhasilan Sasaran 2 Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dengan indikator yaitu persentase Angka Harapan Hidup tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,61	73,65	100	73,72	73,83	100,15
Rata-rata capaian kinerja					100			100,15

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Indikator Angka Harapan Hidup adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan yang telah dicapai dalam suatu masyarakat dan digunakan untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat.

Realisasi Indikator Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar 73,83 tahun yang menunjukkan bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Toraja Utara tercatat mencapai 100 sehingga dapat dikatakan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2023 di Kabupaten Toraja Utara diperkirakan dapat hidup hingga usia 73 -74 tahun. Dibandingkan dengan target sebesar 73,72 maka capaian indikator ini adalah mencapai sebesar 100,15%.

Angka Harapan hidup Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 sebesar 73,83 mengalami peningkatan sebesar 0,18 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dan apabila dibandingkan dengan Sulawesi Selatan sebesar 71,22 Angka Harapan Hidup Kabupaten Toraja Utara masih lebih tinggi.

Tujuan 3	Meningkatnya Daya Saing Destinasi Wisata
-----------------	---

Keberhasilan tujuan Meningkatkan Daya Tarik Pariwisata dengan indikator



Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Analisis Pencapaian Tujuan 3
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
% Kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD	%	5,00	2,50	50	6,00	1,91	31,83
Rata-rata capaian kinerja				50			31,83

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat diuraikan bahwa Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 46.326.186.172,05 dan realisasi PAD sektor pariwisata pada tahun 2023 sebesar Rp 889.197.000,- sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi PAD sektor pariwisata terhadap total PAD adalah sebesar 1.91%. PAD sektor pariwisata bersumber dari tagihan retribusi objek wisata yang sudah melakukan MoU dengan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Jumlah objek wisata yang sudah MoU adalah 24 objek wisata, namun yang sudah beroperasi dan memberikan retribusi baru 23 objek wisata. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya yaitu 2.5%. Untuk meningkatkan kontribusi PAD sektor Pariwisata, Kabupaten Toraja Utara tetap melakukan upaya seperti:

1. Melakukan promosi dan pemasaran pariwisata budaya Toraja di Nusantara baik melalui media sosial.
2. Terselenggaranya 2 (dua) event festival pada tahun 2023 yaitu Event Festival Budaya dan Festival Paduan Suara.



3. Melakukan penertiban dan pembatasan terhadap tempat/lokasi atau sarana hiburan malam, arena judi terselubung, bar dan cafe yang menyimpang dari perizinan.
4. Melakukan perencanaan wisata dengan proses yang ketat.
5. Menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam bidang kepariwisataan

Sasaran 3	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata
------------------	---

Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatkan Daya Saing Destinasi Wisata

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	15,00	112,76	751,73	25	3,9	15,6
Rata-rata capaian kinerja					751,73			15,6

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Sasaran % peningkatan kunjungan wisata menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan Nusantara dan Mancanegara mengalami penurunan yang drastis disebabkan.....???? Namun demikian jumlah kunjungan wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara mengalami peningkatan dari 264.314 wisatawan (2022) yang terdiri dari jumlah wisatawan mancanegara (6.495) dan nusantara (257.819) menjadi 274.553 wisatawan (2023) yang terdiri dari 264.825 wisatawan Nusantara dan 9.728 wisatawan mancanegara.



$$= \frac{(\text{jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n - 1) \times 100}{\text{jumlah wisatawan tahun } n - 1}$$

$$= \frac{(274.553 - 264.314)}{264.314} \times 100$$

$$= 3,9$$

Dampak dari peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara adalah lama tinggal wisatawan di Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 seperti pada Tabel 3.7

Tabel 3.7
Rata-rata Lama Tinggal Tamu Asing
dan Tamu Domestik Kabupaten
Toraja Utara
Tahun 2023

No.	Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
1.	Januari	3	2
2.	Februari	3	2
3.	Maret	3	2
4.	April	3	2
5.	Mei	3	2
6.	Juni	3	2
7.	Juli	3	2
8.	Agustus	3	2
9.	September	3	2
10.	Oktober	3	2
11.	November	3	2
12.	Desember	3	2
Rata-rata Lama Tinggal Tahun 2023		3	2



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Toraja Utara Tahun 2023



Tujuan 4	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi
-----------------	--

Keberhasilan tujuan ini diukur melalui capaian atas 1 indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi. Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Analisis Pencapaian Tujuan 4
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi

Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	55,60	47,12	84,74	62,30	54,90	88,12
Rata-rata capaian kinerja				84,74			88,12

Sumber : Menpan RI Tahun 2023

Indeks Reformasi Birokrasi yaitu indeks yang menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu penyederhanaan birokrasi serta digitalisasi birokrasi.

Dari tabel diatas nilai Reformasi Birokrasi Kabupaten Toraja Utara untuk tahun 2023 adalah sebesar 54,90 dengan total capaian 88,12%. Capaian ini meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya (2022) yaitu sebesar 84,74% dari target. Namun demikian dari pencapaian nilai terjadi peningkatan sebesar 3,9 (47,12 menjadi 54,90). Peningkatan nilai ini dipengaruhi oleh adanya komitmen pimpinan yang semakin tinggi dan ketersediaan bukti dukung dari 8 area perubahan termasuk adanya dokumen RB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yang telah disesuaikan dengan dokumen RPJMD dan penginputan data rencana aksi Road Map Tematik.

Walaupun ada peningkatan nilai yang positif tetapi masih banyak yang perlu dibenahi pada tahun mendatang antara lain sesuai rekomendasi Menpan RB antara lain:



1. Memformalkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021`-2026. Selanjutnya mendorong Perangkat Daerah untuk menyusun rencana aksi/rencana tindak serta meningkatkan peran tim RB dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan Reformasi Birokrasi ;
2. Memastikan Road Map Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah telah ditetapkan;
3. Instansi Pemerintah belum menetapkan penyesuaian Road Map Reformasi Birokrasi;
4. Melanjutkan perbaikan PK sebagian Perangkat Daerah yang kualitasnya masih belum baik. Pastikan seluruh sasaran strategis yang dikawal berorientasi outcome sesuai dengan levelnya, disertai dengan pemilihan indikator kinerja yang tepat yaitu memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja ;
5. Melaksanakan asessment kepada seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi. Selanjutnya menerapkan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan dalam Permen PANBR No.40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam manajemen ASN
6. Pemerintah Kabupaten Toraja Utara perlu mendasari setiap komponen pada kegiatan statistiknya sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang;
7. Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan melakukan asesmen kepada seluruh pegawai dan memanfaatkan hasil asesmen sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi;
8. Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting kaitannya dengan keuangan dan kinerja;
9. Melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkala atas implementasi kebijakan pengawasan, agar diketahui apakah sistem pengawasan sudah baik, sehingga dapat



- mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dapat merugikan negara;
10. Mengimplementasikan sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada pengguna layanan apabila layanan tidak sesuai standar yang bias disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik pelayanan di masing-masing Perangkat Daerah;
 11. Melakukan survei kepuasan secara berkala pada seluruh layanan. Kemudian menginformasikan hasil survei kepuasan sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan menindaklanjuti rekomendasi hasil survei untuk meningkatkan kualitas layanan yang berkelanjutan.

Sasaran 4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
------------------	---

Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai SAKIP Daerah dan . Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai SAKIP Daerah	%	60,00(B)	58,13 (CC)	96,88	61,50 (B)	60,36 (B)	98,14
Rata-rata capaian kinerja					96,88			98,14

Sumber : Menpan RI Tahun 2023

Klasifikasi nilai laporan kinerja Berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP penilaian SAKIP mempunyai kategori sebagai berikut :

1. AA Nilai >90-100 (Sangat Memuaskan)



2. A Nilai > 80-90 (Memuaskan)
3. BB Nilai > 70-80 (Sangat Baik)
4. B Nilai > 60-70 (Baik)
5. CC Nilai > 50-60 (Cukup)
6. C Nilai > 30-50 (Kurang)
7. D Nilai 0 – 30 (Sangat Kurang)

Untuk tahun 2023, nilai hasil evaluasi/penilaian terhadap SAKIP Tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara mendapat nilai B 60,36 dengan kategori Cukup, nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 58,13. Belum tercapainya target disebabkan antara lain yaitu penetapan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja Perangkat Daerah dan Pemda belum seluruhnya berorientasi hasil dan belum dilengkapi dengan indikator yang SMART. Oleh karena itu, pada tahun 2023 dilakukan pelatihan sistem perencanaan untuk meningkatkan kemampuan SDM melakukan penyusunan dokumen perencanaan dan menyusun laporan kinerja.

Agar penerapan akuntabilitas kinerja, lebih efektif maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyempurnakan kualitas dokumen perencanaan kinerja level Pemerintah Daerah dengan memastikan seluruh rumusan tujuan dan sasaran telah berorientasi *outcome* sesuai dengan jenjang levelnya, dan dilengkapi dengan indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur tercapainya kinerja;
2. Melanjutkan perbaikan PK sebagian Perangkat Daerah yang kualitasnya masih belum baik. Pastikan seluruh sasaran strategis yang dikawal berorientasi *outcome* sesuai dengan levelnya, disertai dengan pemilihan indikator kinerja yang tepat yaitu memenuhi kriteria SMART dan Cukup untuk mengukur ketercapaian kinerja Perangkat Daerah;
3. Menyempurnakan kualitas pohon kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 89 Tahun 2021 dengan cara memastikan pohon kinerja telah mengidentifikasi CSF sesuai kebutuhan, memastikan penjenjangan kinerja dari level kinerja strategis, kinerja taktikal hingga operasional memenuhi hubungan logis sebab-akibat yang baik sehingga hubungan kinerja, strategi, kebijakan, serta kinerja/aktivitas antar bidang (*crosscutting*) dapat terbangun secara cukup. Pohon kinerja yang telah disusun secara ideal diharapkan dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan cascading kinerja dari level Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, hingga ke individu;
4. Memastikan keselarasan kinerja yang dikawal pada dokumen perencanaan Perangkat Daerah khususnya antara Renstra, IKU dan PK;



-
5. Memperbaiki kualitas dokumen IKU sebagian Perangkat Daerah agar menyajikan rumus perhitungan, sumber data dan penanggung jawab data. Kemudian memastikan bahwa rumus perhitungan yang tercantum didalam dokumen IKU sesuai dengan substansi indikatornya, sehingga data kinerja yang dihasilkan andal dan benar-benar dapat menggambarkan ketercapaian sasaran/kinerja;



6. Memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran dan pengumpulan data kinerja, agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian kinerja secara berkala dan *real time* baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Selain itu, menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
7. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, naming juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dapat dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
8. Inspektorat dan/atau tim agar melakukan reviu terhadap seluruh dokumen laporan kinerja Perangkat Daerah, kemudian memastikan seluruh substansi yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 terakomodir di dalam laporan kinerja yang disusun, diantaranya dengan menyajikan perbandingan capaian kinerja dengan realisasi tahun sebelumnya dan target kinerja akhir periode Renstra, *benchmark* kinerja dengan capaian level nasional, provinsi, atau kabupaten/kota terdekat (jika ada). Selanjutnya, menyajikan analisis faktor pendorong/penghambat tercapainya target kinerja dan efisiensi gangguan sumber daya secara lebih mendalam dan spesifik;
9. Mengoptimalkan pemanfaatan laporan kinerja salah satunya dengan memastikan penetapan target kinerja lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan realisasi target kinerja tahun sebelumnya sehingga target kinerja yang dimiliki lebih realistis dan menggambarkan peningkatan kinerja;
10. Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Memperbaiki kualitas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal agar dapat memberikan catatan yang lebih spesifik dan substantif khususnya pada komponen perencanaan kinerja Perangkat Daerah, sehingga rekomendasi yang diberikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan konkret serta berdampak pada perbaikan kualitas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di tahun berikutnya;
12. Merumuskan mekanisme monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal untuk memastikan seluruh saran/rekomendasi yang diberikan ditindaklanjuti.

Sasaran 5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
------------------	---



Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai IKM dan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	99,6	80,76	99,6	82,05	82.15	100,12
Rata-rata capaian kinerja					99,6			100,12

Sumber : Bappeda Tahun 2023

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara telah



melakukan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada 13 unit kerja. Hasil survei pada masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Instansi	IKM	
		Nilai	Klasifikasi
1	Kesu	82,41	Baik
2	Sanggalangi	78,31	Baik
3	Tallunglipu	83,07	Baik
4	Rantepao	84,01	Baik
5	Sesean	81,38	Baik
6	Sa'dan	84,47	Baik
7	Dinas Pendidikan	82,92	Baik
8	Dinas Kesehatan	81,94	Baik
9	Dinas Pertanian	84,75	Baik
10	Dinas PUTR	85,32	Baik
11	Dinas Perkimtan	77,04	Baik
12	Satpol PP	77,60	Baik
13	Dinas Sosial	82,91	Baik
14	Dinas Tenaga Kerja	84,28	Baik
15	DP3AP2KB	81,86	Baik
16	Dinas Kependudukan	80,64	Baik
17	Dinas PMPTSP	80,14	Baik
18	Dinas Pariwisata	82,78	Baik
19	Dinas Perindustrian	85,65	Baik
20	BPBD	82,62	Baik
	Pemerintah Daerah (<i>overall</i>)	82,15	Baik

Sumber : Survey Kepuasan Masyarakat Toraja Utara Tahun 2023

Nilai rata-rata IKM dari hasil survey tersebut tersebut adalah sebesar 82,15 sehingga dibandingkan dengan target sebesar 82,05 maka capaian indikator ini adalah mencapai 100,12.

Keberhasilan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya kemampuan SDM yang melakukan pelayanan dan membaiknya fasilitas pelayanan yang dimiliki. Hasil ini sejalan



dengan nilai kepatuhan pelayanan publik oleh Ombudsman yaitu 79,14 (zona kuning, kategori C dengan Opini Sedang).

Sasaran 6	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah
------------------	---

Keberhasilan Sasaran ini diukur melalui 1 indikator yaitu Nilai IPKD dan hasil



pengukuran kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	75	61,8751	82,5	78	76,998	98,7
Rata-rata capaian kinerja				82,5			98,7

Sumber : Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov.Sulsel Tahun 2023

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, IPKD Kabupaten Toraja Utara pada Tahun 2023 adalah 76,998 sehingga capaian sebesar 98,7% dari target 78 di tahun 2023. Hasil ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 61,8751.

Tujuan 5	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Merata
-----------------	--

Keberhasilan sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat merata indikator yaitu PDRB. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Tabel 3.12
Analisis Pencapaian Tujuan 5
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Merata

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023(%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	PDRB/kapita (Rp, Juta)	Rp.	42,00	42,17	100,4	42,06	45,03	107,06
2	Rasio Gini	Angka/Skor	0,369	0,356	103,5	0,368	0,348	105,43
Rata-rata capaian kinerja					101,95			106,2

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Pertumbuhan PDRB perkapita dipakai untuk menggambarkan kemakmuran penduduk suatu daerah, dan PDRB perkapita atas dasar harga belaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. PDRB/Kapita Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar (Rp,Juta) 45,03 atau mencapai 107,06% jika dibandingkan target sebesar (Rp. Juta) 42,06. Hasil ini meningkat dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp.Juta) 42,17.

Rasio Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, tingkat ketimpangan di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan di pedesaan. Hal ini karena di pedesaan sumber pendapatannya relatif sama, yaitu umumnya pertanian sehingga rasio gininya relatif rendah dibandingkan perkotaan. Rasio Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan yang bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi rasio gini semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Adapun Klasifikasi Nilai Rasio Gini adalah sbb :



Nilai Rasio Gini	Distribusi Pendapatan
... < 0,40	Tingkat Ketimpangan Rendah
0,40 - 0,50	Tingkat Ketimpangan Sedang
..... > 0,50	Tingkat Ketimpangan Tinggi

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Rasio Gini Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebesar 0,348 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada tingkat ketimpangan rendah. Hasil ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 rasio gini Toraja Utara sebesar 0,356.

Sasaran 7	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah
------------------	--

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Angka	4,54-6,06	5,27	94,02	5,19-6,92	3,94	75,91
Rata-rata capaian Kinerja					94,02			75,91

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan tanpa mengaitkannya dengan tingkat pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi



menunjukkan peningkatan dari kapasitas produksi maupun jasa dalam kurun waktu tertentu.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar 3,94%, atau mencapai 75,91 persen jika dibandingkan dengan target sebesar 5,19 persen. Dibandingkan tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 5,27 persen, pertumbuhan ekonomi Kabupaten mengalami perlambatan sebesar 0,08 persen.

Perlambatan atau penurunan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 diakibatkan oleh adanya fenomena terkait suhu muka laut atau el nino di Indonesia secara umum termasuk di Toraja Utara. Secara umum dampak yang ditimbulkan dari fenomena el nino adalah kekeringan akibat kurangnya curah hujan sehingga berdampak buruk terhadap hasil pertanian yang merupakan mata pencaharian utama oleh sebagian besar Masyarakat Toraja Utara. Akibatnya adalah pendapatan Masyarakat menjadi menurun.

Sasaran 8	Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
------------------	---

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		3,09	1,99	135,6	3,05	2,60	114,75
Rata-rata capaian kinerja				135,6			114,75

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang berkerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, pengangguran adalah penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan



usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan dan kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetap belum mulai bekerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi.

Dari tabel diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Toraja Utara mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar 1,99 menjadi 2,60 pada tahun 2023. Adapun pencapaian indikator tersebut adalah sbb:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\
 &\quad 3,05 - (2,60 - 3,05) \\
 &= \frac{\quad}{3,05} \times 100\% \\
 &= \frac{3,05 - (-0,45)}{3,05} \times 100\% \\
 &= 114,75
 \end{aligned}$$

Sasaran 9	Berkurangnya Kemiskinan Daerah
------------------	---------------------------------------

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator Angka Kemiskinan (%). Hasil pengukuran kinerja terhadap indikator ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
Berkurangnya Kemiskinan Daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Angka Kemiskinan	%	11,50	11,65	98,69	11,45	12,12	94,15
Rata-rata capaian kinerja					98,69			94,15

Sumber : BPS Kab. Toraja Utara Tahun 2023



Jumlah penduduk miskin tahun 2023 di kabupaten Toraja Utara berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kab. Toraja Utara adalah sebanyak 29.140 dari jumlah penduduk sebanyak 261.652 atau mencapai sebesar 12,12%. Dibandingkan dengan target sebesar 11,45 persen maka capaian indikator ini adalah sebesar 94,15% dengan perhitungan sebagai berikut:

Capaian indikator angka kemiskinan dapat dilihat dibawah ini:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{11,45 - (12,12 - 11,45)}{11,45} \times 100\% \\ &\quad 11,45 - 0,67 \\ &= \frac{11,45 - 0,67}{11,45} \times 100\% \end{aligned}$$



= 94,15

Angka Kemiskinan Tahun 2023 sebesar 12,12 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 11,65 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan Masyarakat yang membuat konsumsi Masyarakat menurun walau nilai rupiah konsumsi tersebut tetap. Ketimpangan ini diakibatkan oleh virus penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak (VPMK) mengakibatkan tidak sedikit hewan ternak mati sehingga ekonomi Masyarakat menjadi menurun karena mayoritas Masyarakat memiliki hewan ternak sebagai salah satu sumber pendapatan.

Sasaran 10	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah
-------------------	---

Keberhasilan sasaran Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah melalui 2 indikator yaitu Indeks Daya Saing Infrastruktur dan Indeks Rasio Bencana. Hasil pengukuran kinerja terhadap masing-masing indikator tersebut sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Terpeliharanya Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan Dalam Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Daya Saing Infrastruktur		70,31	71,74	100,98	72,06	76,62	106,32



2	Indeks Resiko Bencana		149,9	150	100,06	149,8	150	99,86
Rata-rata capaian kinerja					100,52			103,09

Sumber : BPBD, Dinas PU & Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2023

Indeks Daya Saing Infrastruktur adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensinya. Pembangunan infrastruktur menjadi kunci peningkatan daya saing daerah, komitmen pembangunan infrastruktur berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tidak tergantung pada konsumsi domestik. Adapun Indeks Daya Saing Infrastruktur Kabupaten Toraja Utara adalah sbb:

Indikator	%	Bobot (%)	Indeks (%)
Kemantapan Jalan Kabupaten	74,63	25,00	18,65
Akses Air Minum Layak	79,20	17,50	13,86
Akses Sanitasi Layak	78,06	17,50	13,66
Pemukiman Layak Huni (Tidak Kumuh)	93,86	17,50	16,42
Rumah Layak Huni	66,06	17,50	11,56
Persentase Panjang Jalan yang memenuhi kriteria jalan yang berkeselamatan	49,39	5,00	2,47
Indeks Daya Saing Infrastruktur		100,00	76,62

Indeks Resiko Bencana adalah dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. Perhitungan tingkat risiko di setiap kabupaten dilakukan dengan memperhatikan faktor Hazard (bahaya), Vulnerability (Kerentanan) dan Capacity (Kapasitas).

Sesuai dengan buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toraja Utara berada pada posisi



150 dengan kategori tinggi.

Dari data tersebut diatas maka data tersebut sejalan dengan kejadian bencana di Toraja Utara dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	WILAYAH TERDAMPAK (DESA/LEMBANG)
1	Longsor	31	31
2	Angin Puting Beliung	13	12
3	Kebakaran	16	16
4	Banjir (Air Sungai Meluap)	0	0
TOTAL TITIK KEJADIAN		60	59

Tujuan 7	Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat
----------	--

Tabel 3.18
Analisis Pencapaian Tujuan 7
Meningkatkan Kemandirian Pangan Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Skor pola pangan harapan		84,98	78,7	92,61	86,05	81,1	94,25
Rata-rata capaian kinerja					92,61			94,25

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2023



Skor Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energy dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrument untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Dan juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan. PPH juga merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman ketersediaan pangan suatu wilayah (makro).

Pada tabel diatas Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 adalah sebesar 81,1 dibandingkan pada pada tahun 2022 sebesar 78,7, tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,4% dan capaian indikator ini adalah sebesar 94,25%.

Sasaran 11	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat
-------------------	--

Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Ketersediaan Energi Perkapita (kkal/kapita/hari)		2.372	2100	88,53	2327.81	2100	88,50
2	Ketersediaan Protein Perkapita (gram/kapita/hari)		65,29	57	87,30	66.05	60	90,84
Rata-rata capaian kinerja					87,92			89,67

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Ketersediaan energi perkapita (kkal/kapita/hari) yang dikandung dari bahan makanan tergantung atas dua hal yaitu jumlah ketersediaan dan kandungan energinya dalam suatu



komoditas. Jumlah ketersediaan terbesar untuk tiap orang per harinya dari kesembilan pangan strategis berasal dari beras dan jagung.

Dari tabel diatas pada tahun 2023 ketersediaan energi di Kabupaten Toraja Utara adalah sebesar 2.100. Dari angka tersebut bisa diartikan bahwa tingkat ketersediaan energi di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 memenuhi standar ketersediaan energi yaitu 2.100 kkal/kap/hari dimana angka kecukupan energi adalah 2.100.00 kkal/kap/hari.

Ketersediaan protein gram/kapita/hari yaitu ketersediaan bahan makan perkapita dalam bentuk kandungan nilai gizinya dengan satuan gram protein. Pada tahun 2023 ketersediaan protein di Kabupaten Toraja Utara sebesar 60 gram/kapita/hari. Walaupun masih rendah dibandingkan dengan angka kecukupan yaitu sebesar 63 gram/kapita/hari tetapi dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu dari 57 gram/kapita/hari menjadi 60 gram/kapita/hari di tahun 2023.

Tujuan 8	Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan
-----------------	--

Tabel 3.20
Analisis Pencapaian Tujuan 8
Meningkatkan Peran Pemuda Dalam Pembangunan

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	0,18	0,35	194,4	0,36	0,05	13,89
Rata-rata capaian kinerja					194,4			13,89

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga



Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi mandiri dapat dihitung dengan formula sbb :

$$= \frac{\text{Jumlah Pemuda (16 – 30 tahun) berwirausaha di kabupaten}}{\text{Jumlah Pemuda (16 – 30 tahun) di kabupaten}} \times 100$$

$$= \frac{33}{67.981} \times 100\%$$

$$= 0,05$$

Capaian dari sasaran ini menurun dari tahun sebelumnya yaitu dari 0,35 menjadi 0,05 karena belum maksimalnya pembinaan terkait kegiatan ekonomi mandiri di kalangan pemuda serta kurangnya minat pemuda di bidang ekonomi mandiri. Pembinaan tidak maksimal karena adanya keterbatasan anggaran di tahun 2023. Jumlah pemuda yang berwirausaha di tahun 2023 adalah 33 pemuda dengan data Data penduduk usia 16 -30 tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

USIA PEMUDA 16 - 30 TAHUN
KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN 2023

KODE	KECAMATAN	LK	PR	JMLH
73.26.01	RANTEPAO	3647	3581	7228
73.26.02	SESEAN	1820	1587	3407
73.26.03	NANGGALA	1286	1109	2395
73.26.04	RINDINGALLO	1281	1078	2359
73.26.05	BUNTAO	1402	1335	2737
73.26.06	SA'DAN	2773	2492	5265
73.26.07	SANGGALANGI	1692	1679	3371
73.26.08	SOPAI	2119	1971	4090
73.26.09	TIKALA	1837	1639	3476
73.26.10	BALUSU	1087	981	2068
73.26.11	TALLUNGLIPU	2678	2683	5316
73.26.12	DENDE' PIONGAN NAPO	1216	1118	2334
73.26.13	BUNTU PEPASAN	2204	2112	4316
73.26.14	BARUPPU'	993	914	1907
73.26.15	KESU'	2402	2417	4819
73.26.16	TONDON	1589	1459	3048
73.26.17	BANGKELEKILA'	1112	981	2093
73.26.18	RANTEBUA	1244	1025	2269
73.26.19	SESEAN SULOARA	1015	921`	1936
73.26.20	KAPALA PITU	1030	941	1971
73.26.21	AWAN RANTE KARUA	781	750	1531
JUMLAH		33.208	32.773	67.981

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023



Sasaran 12	Meningkatnya Prestasi Pemuda
-------------------	-------------------------------------

Tabel 3.21
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 12
Meningkatnya Prestasi Pemuda

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional		1,61	0,15	73,91	1,76	2,8	159
Rata-rata capaian kinerja					73,91			159

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Pada tahun 2023 Kabupaten Toraja Utara mengikuti Turnamen Kejuaraan Daerah Pelajar tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 di Makassar dan dalam turnamen tersebut berhasil meraih 7 medali dari 5 cabang olahraga yang diikuti dengan total 33 medali yang diperebutkan. Medali emas sebanyak 2 (dua) medali, medali perak 4 (empat) medali dan medali perunggu 1 (satu) medali.

Untuk mendapatkan realisasi % peningkatan pemuda berprestasi tingkat nasional dapat dilihat pada formula sbb :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah perolehan medali}}{\text{Jumlah keseluruhan medali yang diperebutkan}} \times 100 \\
 &= \frac{7}{250} \times 100 \\
 &= 2,8
 \end{aligned}$$

Tujuan 9	Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa)
-----------------	--

Keberhasilan tujuan Meningkatkan *Kualitas dan Pemerataan Pembangunan Lembang (desa)* melalui pembagunan desa terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja



yaitu Indeks Desa membangun (IDM) Kabupaten dalam kegiatan pembangunan desa. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Analisis Pencapaian Tujuan 9
Meningkatkan Kualitas dan Pemertaan Pembangunan Lembang (desa)

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Indeks desa membangun (IDM) kabupaten		0,5781	0,5878	101,6	0,5878	0,6020	102,4
Rata-rata capaian kinerja				101,6			102,4

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dalam upaya menyejahterakan rakyat, pemerintah membuat beberapa langkah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif dan sustainable, salah satunya adalah melalui program pembangunan desa. Untuk melaksanakan program tersebut diperlukan ketersediaan data dasar yang dipetakan dalam Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) ini nantinya dapat digunakan untuk menetapkan status kemajuan suatu desa dan merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan suatu desa dalam melakukan pembangunannya.

Dari tabel diatas pencapaian indikator Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten adalah pada tahun 2023 adalah 0,6020% dan dibandingkan dengan target sebesar 0,5878 maka Capaian indikator ini adalah sebesar 102,4%.

Sasaran 13	Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)
-------------------	--

Capaian kinerja sasaran 13 Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa) sebagai berikut:



Tabel 3.23
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 13
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% lembang kualifikasi maju	%	0,90	1,80	200	1,80	2,7	150
Rata-rata capaian kinerja					200			150

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Berdasarkan Permendesa PDT Trans Nomor 2 Tahun 2016 ada 5 (lima) penggolongan status desa yaitu :

1. Desa Mandiri dengan $IDM > 0,8155$
2. Desa Maju $IDM > 0,7072 \leq 0,8155$
3. Desa Berkembang $IDM > 0,5989 \leq 0,7072$
4. Desa Tertinggal $IDM > 0,4907 \leq 0,5989$
5. Desa Sangat Tertinggal $IDM \leq 0,4907$

Dari tabel diatas persentase lembang berkualifikasi maju di Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar 2,7% yang artinya bahwa pada tahun 2023 ada 1 (satu) perubahan status lembang dari status berkembang ke status maju. Adapun Lembang yang mengalami perubahan status tersebut adalah Lembang Tallulolo Kecamatan Kesu'.

Tujuan 10	<i>Mengurangi Penyakit Sosial dalam Masyarakat</i>
------------------	---

Keberhasilan tujuan Mengurangi penyakit social dalam masyarakat melalui pengendalian gangguan ketentraman dan ketertiban terdiri dari 1 (satu)



indikator kinerja yaitu Persentase penurunan angka kriminalitas dalam kegiatan Rasia, Patroli dan pengawasan . Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam table berikut ini:

Tabel 3.24
Analisis Pencapaian Tujuan 10
Mengurangi Penyakit Sosial dalam Masyarakat

Indikator Tujuan		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% Penurunan angka Kriminalitas	%	3,50	13,09	-174	3,40	14,52	-227
Rata-rata capaian kinerja					-174			-227

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Angka Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator persentase penurunan angka kriminalitas adalah untuk indikator untuk menjelaskan bagaimana penanganan kasus yang ditangani sepanjang tahun 2023. Pengukuran persentase penurunan angka kriminalitas adalah dengan melakukan pengukuran perbandingan antara jumlah tindak pidana yang dapat ditangani dengan per 10 ribu jumlah penduduk. Dalam tahun 2023 jumlah kasus pidana yang terjadi sebanyak 380 kasus dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kriminal} = \frac{\text{Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$$

$$\text{Indeks Kriminal} = \frac{380}{261.652} \times 10.000$$

$$\text{Indeks Kriminal} = 14,52$$



Sasaran 14	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum
-------------------	---

Capaian kinerja sasaran 14 Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum sbb :

Tabel 3.25
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 14
Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	% gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	89,00	100	112,35	90,00	91	101
Rata-rata capaian kinerja					112,35			101

Sumber : Satpol PP, Damkar dan Penyelamatan Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator kinerja Indeks Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan merupakan keberhasilan dalam penanganan kasus pelanggaran yang ditemukan sebanyak 231 kasus antara lain pada saat gelar Razia, Patroli Pengawasan, Aduan Masyarakat, dan Kegiatan Pengamanan kegiatan/rumah jabatan.

Aduan Masyarakat yang diterima sebanyak 231 kasus dan 210 kasus yang telah diselesaikan. Realisasi Indikator tersebut diatas dapat dilihat dibawah ini :

$$= \frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100$$

$$= \frac{210}{231} \times 100\%$$

$$= 91$$

**Tujuan 11*****Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan***

Keberhasilan tujuan Meningkatnya intensitas kegiatan lembaga keagamaan melalui fasilitas kegiatan lembaga keagamaan terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan kegiatan lembaga keagamaan. Capaian atas pada indikator tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Tujuan 11
Meningkatkan Intensitas Kegiatan Lembaga Keagamaan

Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1 Cakupan kegiatan lembaga keagamaan	%	100	100	100	100	86,48	86,48
Rata-rata capaian Kinerja				100			86,48

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel diatas pencapaian indikator Cakupan kegiatan lembaga keagamaan dapat menjelaskan bagaimana pemerintah berperan dalam



memfasilitasi kegiatan – kegiatan lembaga keagamaan antara lain safari natal, safari ramadhan, paskah, maulid .

Sasaran 15	Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat
-------------------	--

Capaian kinerja sasaran 15 Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 3.27
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15
Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Bermasyarakat

Indikator Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina	%	100	100	100	100	103,13	103,13
Rata-rata capaian kinerja					100			103,13

Sumber : Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Berkembangnya kehidupan beragama dalam bermasyarakat merupakan pencerminan bertumbuhnya kesadaran toleransi antar umat beragama. Indikator Cakupan kegiatan lembaga keagamaan yang dibina salah satunya dapat diukur dengan jumlah belanja hibah yang difasilitasi antara lain :

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH
1	2
1	Pembayaran LS atas Belanja Bantuan Biaya Pendidikan Strata Dua (S2) atas Nama Pdt.ELEN YUSUF PADANG,S.Th sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor:198/II/2023 tanggal 20 Februari 2023.
2	Pembayaran LS atas Belanja Pembangunan Gedung Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaan Rante Pasele sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor:199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).



3	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA KIOS SMBAKO BUNGIN KEC.SOPAI sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor:199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
----------	--



NO.	NAMA PENERIMA HIBAH
4	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH RAKERNAS PMKRI Sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor:199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
5	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT EL BETHEL KARIANGO sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
6	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI i BUNTAO sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor:199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 (Bersumber Dari Dana Dau Kesehatan).
7	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA RANTE GESSA' LEMBANG PARINDING KECAMATAN SESEAN sesuai SK Bupati Toraja Utara Nomor: 199/II/2023 tanggal 20 Februari 2023, (Sumber Dana DAU Kesehatan).
8	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA PANTEKOSTA TABERNAKEL (GPT) JEMAAT PONDING BARUPPU
9	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA KHARISMATIKA DI INDONESIA (GPKDI) TIKALA,
10	Pembayaran LS atas Belanja Hibah Kepada GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) PANGA'
11	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT PALANGKA
12	Pembayaran LS atas Belanja Hibah PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA
13	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PENTAKOSTA (GGP) TONDON
14	Pembayaran LS atas Belanaj HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) TONDON
15	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT RAMBO
16	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA KHARISMATIKA DI INDONESIA (GPKDI) TAGARI
17	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT YARDEN POTON



18	Pembayaran LS atas Belanj HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) KAMPUNG BARU
19	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT SAMARIA RANDANAN
20	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) TIKALA
21	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KASIH KRISTUD BOLU
22	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) JEMAAT SMIRNA BA'LELE



NO.	NAMA PENERIMA HIBAH
23	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT NE'BAKO
24	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO'WE
25	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT MALOTO
26	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT MATANDE
27	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI DINDONESIA (GPDI) MARARA
28	Pembayaran LS atas Belanja PALANG MERAH INDONESIA
29	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA
30	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA WILAYAH II
31	Pembayaran LS Belanja HIBAH DHARMA WANITAPERSATUAN KABUPATEN TORAJA UTARA
32	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT BUNTU BATU
33	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT PENGKAROAN MANUK
34	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPDI) BUNTU BATU TIKALA
35	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT SALU TANGNGA
36	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO'GORANG
37	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT PARANGGAI LANDA



38	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO' TANGNGA
39	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT PARANGGAI TO' INDUK
40	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TO' LEMUDAK
41	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT TALIMBANGAN
42	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ERAN BATU
43	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ALLA' SALU
44	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT LEDO
45	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KALO'
46	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT BUNTU RIA
47	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA (GGP) JEMAAT RATTE BARUPPU
48	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) DUSUN DARRA' KELURAHAN TALLUNGLIPU
49	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PEMUDA KATOLIK
50	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) ECCLESIA RANTEPAO JALAN KELINCI
51	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH REHABILITASI LAPANGAN SEKOLAH SMA KATOLIK RANTEPAO
52	Pembayaran LS atas Belanja PENGADAAN ALAT MUSIK SOUND SYSTEM GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT TIBERIAS CENTER TORAJA
53	Belanja HIBAH PERAYAAN SYUKUR 85 TAHUN BAPTIS PERTAMA KATOLIK DI TORAJA



54	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH MODAL USAHA PENGRAJIN SOUVENIR KE'TE' KECAMATAN KESU
55	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT SILO PA'TINNORAN
56	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA WINDA BERLIANA JERSEY PATULAK
57	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA (GKP) JEMAAT SA'DAN MINANGA
58	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KATOLIK STASI SANTO KLEMENS POKA LEMBANG AMPANG BATU
59	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KERAPATAN PANTEKOSTA JEMAAT KARIANGO LEMBANG BARUPPU UTARA
60	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) NE' ME'SE
61	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT PERANGIAN LEMBANG AMPANG BATU
62	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)
63	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH CANONICAE JESU DOMINO (CJD) KOMUNITAS SANTA THERESIA RANTEPAO
64	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BANTUAN PENDIDIKAN MAHASISWA UKIP
65	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT FILADELFIA RANTEPAO
66	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BANTUAN BEASISWA PENDIDIKAN ATAS NAMA FENIDA LARASATY PATANDUNG
67	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT RANTEKATA LEMBANG ISSONG KALUA
68	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT DUMBIA LEMBANG RINDINGALLO



69	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA SIDANG PANTEKOSTA DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT FILADELFIA SALU BARUPPU
70	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH Bantuan Pendidikan atas Nama ZET KARANGAN
71	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT SA'DAN MATALLO
72	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT LOLAI KLASIS KAPALA PITU LEMBANG KAPALA PITU
73	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA TORAJA JEMAAT RANTE BAI' KLASIS SASI KELURAHAN DERI KECAMATAN SESEAN
74	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA BETHEL TABERNAKEL JEMAAT KRISTUS BANGKIT
75	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA RATU PRATIWI PAKIDING
76	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA YAMARANI TIFANNY SIMON TIPA
77	Pembayaran LS atas Belanja BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN ATAS NAMA MARSYELA TAMBING
78	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJAKIBAIJ JEMAAT RANTEPAO KELURAHAN MALANGO
79	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA KATOLIK STASI SALU BARUPPU KELURAHAN BARUPPU
80	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA SIDANG PENTEKOSTA DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT LIMBONG PADATUAN
81	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA DEKORASI BARRA' BUSA' LEMBANG PATA' PADANG
82	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH HUT PERSEKUTUAN KAUM BAPAK GEREJA TORAJA (PKBGT) KLASIS RANTEPAO
83	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH BEASISWA PENDIDIKAN ATAS NAMA KEZIA CINDERELLA ZATIMANG
84	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT ALFA OMEGA RANTEPONGLU



85	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA (GPPS) JEMAAT BUKIT SION
86	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA TORAJA JEMAAT CABANG KEBAKTIAN SION SALU SARRE KLASIS NONONGAN
87	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA GERAKAN PANTEKOSTA (GGP) JEMAAT KALVARI TOMBANG
88	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH KEPADA GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPSDI) JEMAAT KE'PE
89	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA PANTEKOSTA SERIKAT DI INDONESIA (GPDI) JEMAAT SALUKALLAN
90	Pembayaran LS atas Belanja HIBAH GEREJA JEMAAT PARINDING TEMPAT KEBAKTIAN BUNTU KALANDO KLASIS SASI LEMBANG PARINDING

Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks pendidikan	65.30	65.64	100.52
Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	74.05	73.83	99.70
Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	55.00	3.9	7.09
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Daerah	71,50 (BB)	60.36 (B)	84.41
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	IKM	84.96	82.15	96.69
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Perencanaan dan Keuangan Daerah	IPKD	85.00	76.998	90.58
Meningkatnya Kualitas Pertumbuhan Sektor-Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	6 - 7,5	3.94	65.66
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran	2.95	2.60	111.86
Berkurangnya Kemiskinan Daerah	Angka Kemiskinan	11.31	12.12	92.83
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing	76.80	76.62	99.76
	Indeks Resiko Bencana	149	150.00	99.32
Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat	Ketersediaan Energi Per Kapita	2329.37	2100.00	90.2
	Ketersediaan Protein Per Kapita	68.35	60	87.78
Meningkatnya Prestasi Pemuda	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	2.21	2.8	126
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Ekologi Lembang (Desa)	% Lembang Kualifikasi Maju	2.70	2.7	100



Terpeliharanya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dapat Diselesaikan	93.00	91	97.84
Berkembangnya Kehidupan Beragama dalam Masyarakat	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	100.00	103.13	103.13



3.4 Akuntabilitas Keuangan

1. Pendapatan Daerah

Anggaran Pendapatan Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebesar Rp. 1.085.680.864.625,00 terealisasi sebesar Rp 1.017.036.395.953,45 atau dengan capaian sebesar 93,68% dari target. Rincian Anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut ini

Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan :			
a. Pendapatan Asli Daerah	143.803.896.755,00	46.326.186.172,05	32,24
Pendapatan Pajak Daerah	50.539.720.006,00	21.443.334.426,00	42,43
Hasil Retribusi Daerah	40.283.436.840,00	13.371.095.077,00	33,19
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.900.000.000,00	5.479.962.348,00	79,42
Lain-lain PAD yang sah	46.080.739.909,00	6.067.794.321,05	13,17
b. Pendapatan Transfer	922.726.067.870,00	955.055.305.974,40	103,50
Transfer Pemerintah Pusat	859.615.295.000,00	892.145.197.191,00	103,78
Dana Perimbangan	753.085.239.000,00	788.595.026.691,00	104,72
Dana Insentif Daerah (DID)	5.959.771.000,00	2.979.885.500,00	50,00
Dana Desa	100.570.285.000,00	100.570.285.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	63.110.772.870,00	62.910.108.783,40,00	99,68
Pendapatan Bagi Hasil	48.767.479.270,00	58.249.284.283,40	119,44
Bantuan Keuangan	14.343.293.600,00	4.660.824.500,00	32,49
Transfer Pemerintah Provinsi	63.110.772.870,00	62.910.108.783,40	99,68
Pendapatan bagi hasil pajak	48.767.479.270,00	58.249.284.283,40	119,44
Bantuan Keuangan dari Provinsi	14.343.293.600,00	4.660.824.500,00	32,49
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	19.150.900.000,00	15.618.903.807,00	81,56
Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00



Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	19.150.900.000,00	15.618.903.807,00	81,56
---	-------------------	-------------------	-------



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Jumlah Pendapatan Daerah	1.085.680.864.625,00	1.017.036.395.953,45	93,68

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa kinerja atas peningkatan PAD masih perlu ditingkatkan. Upaya optimalisasi, ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan PAD harus dilakukan agar target yang ditetapkan pada tahun mendatang dapat dicapai serta peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang pendapatan atau organisasi penghasil.

2. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp 1.111.119.090.854,00 dan telah terserap sebesar Rp 965.274.022.720,64 atau mencapai 86,87 % dari anggaran. Rincian Anggaran Belanja dan Realisasi tahun 2023 dapat terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah			
a. Belanja Operasi	724.003.913.706,00	652.349.051.040,64	90,10
Belanja Pegawai	425.699.914.729,00	403.571.697.420,67	94,80
Belanja barang dan jasa	237.523.956.888,00	208.867.112.585,97	87,94
Hibah	60.780.042.089,00	39.910.241.034,00	65,66
Bantuan sosial	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Modal	228.510.776.448,00	156.949.778.336,00	68,68
Belanja Tanah	1.488.408.265,00	1.487.217.265,00	99,92
Belanja Peralatan dan Mesin	21.932.549.257,00	14.110.112.425,00	64,33
Belanja Gedung dan Bangunan	57.293.660.209,00	56.045.498.712,00	97,82
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.788.268.717,00	85.306.949.934,00	57,22
Belanja aset tetap lainnya	7.890.000,00	0,00	0,00
c. Belanja Tak Terduga	400.000.000,00	197.910.300,00	49,48
Belanja tak terduga	400.000.000,00	197.910.300,00	49,48



d. Belanja Transfer	158.204.400.700,00	155.777.283.044,00	98,47
Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	1.914.638.859,00	76,59
Belanja Bantuan Keuangan	155.704.400.700,00	153.862.644.185,00	98,82
Jumlah Belanja	1.111.119.090.854,00	965.274.022.720,64	86,87

Sumber : BKAD Kab. Toraja Utara Tahun 2023

3. Analisis Efisiensi atas Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran

Efisiensi adalah ukuran untuk penggunaan sumberdaya untuk menghasilkan tujuan yang sudah ditetapkan. Anggaran atas 11 sasaran yang ditetapkan adalah sebesar Rp 930.444.683.062 dengan realisasi adalah sebesar Rp 830.194.422.929. Berdasarkan evaluasi atas pencapaian sasaran, seluruh sasaran dapat dicapai dengan efisien. Rincian pengukuran efisiensi belanja dari masing-masing pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:



Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Anggaran	Realisasi	% Penyerapan Anggaran	% Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi	Ket.
1	Meningkatnya derajat pendidikan dan literasi masyarakat	Indeks Pendidikan	4,108,594,250	3,802,906,952	92.6	102.4	9.8	Efisien
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	4,086,943,250	3,792,996,952				
		Program Pembinaan Perpustakaan	21,651,000	9,910,000				
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Angka Harapan Hidup	86,986,373,001	73,276,661,597	84.2	100.15	15.9	Efisien
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84,116,975,001	70,728,552,979				
		Program Pembinaan Keluarga Berencana	2,869,398,000	2,548,108,618				
3	Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	699,058,151	523,150,063	74.8	15.6	-59.2	Tidak Efisien
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	558,124,801	425,719,363				
		Program Pemasaran Pariwisata	140,933,350	97,430,700				
4	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan	Nilai SAKIP Daerah	6,701,465,088	4,835,601,184	72.2	88.12	16	Efisien
		Program Perekonomian dan Pembangunan	790,333,489	650,765,471				



5	Pemerintahan Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	3,284,870,800	2,420,926,207				
		Program Kepegawaian Daerah	463,221,300	302,306,906				
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	2,163,039,499	1,461,602,600				
	Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Sektor- Sektor Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	2,225,220,177	1,617,696,448	72.7	75.91	3	Efisien
		Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	18,608,000	18,543,100				
		Program Pengembangan Ekspor	-	-				
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	-	-				
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan usaha Mikro	-	-				
		Program Pengembangan UMKM	-	-				
		Program penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1,872,774,017	1,265,340,448				
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-				
		Program Penyuluhan Pertanian	333,838,160	333,812,900				



6	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur	8,809,935,463	5,839,192,783	66.3	76.62	10.3	Efisien
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air	34,999,000	34,999,000				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-				
		Program Penataan Bangunan Gedung	480,581,195	307,781,100				
		Program Penyelenggaraan Jalan	799,014,700	620,264,390				
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	20,000,000	12,600,000				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-				
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-				
		Program Kawasan Permukiman	-	-				
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	105,093,500	-				
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	5,946,959,418	3,616,600,600				
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	100,911,000	19,100,000				



		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	66,202,000	61,320,250				
		Program Pengelolaan Persampahan	1,052,497,900	1,050,170,505				
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	30,458,750	22,926,338				
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	173,218,000	93,430,600				
7	Terpenuhinya kebutuhan pangan utama masyarakat	Ketersediaan Energi Per Kapita	174,338,600	143,110,730	82.1	88.5	6.4	Efisien
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-				
		Program Peningkatan Diservikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	31,472,900	26,738,000				
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	142,865,700	116,372,730				
8	Meningkatnya prestasi pemuda	% Peningkatan Pemuda Berprestasi Tingkat Nasional	892,606,880	842,340,500	94.4	8.5	-85.9	Tidak Efisien
		Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	135,140,350	85,140,000				
		Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	757,466,530	757,200,500				



9	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan ekologi lembang (desa)	% Lembang Kualifikasi Maju	20,003,687,051	13,805,338,688	69	150	81	Efisien
		Program Penataan Desa	18,332,613,751	12,404,113,430				
		Program Administrasi Pemerintah Desa	393,451,300	366,213,300				
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1,277,622,000	1,035,011,958				
10	Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban umum	% Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dapat	1,312,980,436	1,077,993,729	82	98.88	17	Efisien
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	318,671,662	284,538,729				
		Program Perlindungan Perempuan	85,260,601	58,279,000				
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	-	-				
		Program Perlindungan Khusus Anak	353,539,399	190,170,000				
		Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	544,313,774	534,246,000				



		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	11,195,000	10,760,000				
11	Berkembangnya Kehidupan beragama dalam masyarakat	Cakupan Kegiatan Lembaga Keagamaan yang Dibina	6,835,137,650	5,554,362,284	81	103.13	22	Efisien
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,743,019,650	5,468,675,600				
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	92,118,000	85,686,684				





BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Toraja Utara merupakan perwujudan pertanggungjawaban Tahunan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026

Berdasarkan hasil evaluasi Capaian rata-rata pelaksanaan 15 sasaran yang mencakup 28 indikator kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 82,2% atau tergolong dalam kriteria **Tinggi**. Capaian di atas menunjukkan bahwa Pemda Toraja Utara turut berkontribusi dalam melaksanakan pembangunan secara regional dan nasional.

Kinerja seluruh sasaran yang ditetapkan telah tercapai dengan sangat baik. Namun demikian, dalam tahun 2023 masih terdapat indikator dalam sasaran yang capaiannya masih perlu diperbaiki sehingga masih perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk diperbaiki dalam tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan %kontribusi PAD sektor pariwisata
- Peningkatan kunjungan wisatawan
- Pertumbuhan ekonomi
- Penurunan Jumlah RT miskin
- Penurunan angka kriminalitas
- Peningkatan pemuda yang berwirausaha melalui berbagai pelatihan
- Peningkatan Infrastruktur jalan, dengan kondisi jalan dalam keadaan baik di Kabupaten Toraja Utara yang belum mencapai 50%.
- Ketepatan OPD dalam menyampaikan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP).

Selain itu, perbaikan atas pengumpulan data kinerja juga harus dilakukan sehingga dapat memberikan data yang akurat yang berguna bagi pengambil keputusan.



Beberapa langkah penting untuk memecahkan permasalahan di atas yang sekaligus akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- ✚ Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat meningkatkan kinerja yang masih tergolong belum baik.
- ✚ Mendorong ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan sehingga kinerja sasaran dapat tercapai.
- ✚ Meningkatkan profesionalisme aparatur pegawai pemerintah dan pengawasan.
- ✚ Mengembangkan sistem informasi pengumpulan data kinerja agar data kinerja yang diperoleh akurat dan berguna bagi pengambil keputusan.
- ✚ Mendorong ketepatan waktu penyampaian LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Perangkat Daerah sehingga penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Kabupaten dapat tepat waktu.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Pemda Toraja Utara berharap LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) Tahun 2023 dapat memenuhi kewajiban berakuntabilitas dan dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

